

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Andi Hamzah, *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Negara (Contempt of Court)*, Sinar Grafika Jakarta, 1988
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Asplund, Knut D, Marzuki, Suparman, dan Riadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2008)
- Maharus Ali, *Pengawasan Peredaran Barang Cetak, due process of law dan ha katas kebebasan mengeluarkan pendapat*, Jurnal Konstitusi. Volume 8 Nomor 4, Agustus 2011. Jakarta:2011
- Marbangun Hardjowirogo, *Hak-hak Manusia*, Yayasan Indayu, Jakarta. 1981
- Maruarar Siahaan, "Peran Makamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum No.3 Vol. 16 Juli 2009: hlm. 250-251.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Presfektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988
- Ronny SH Bako, dkk (2009), *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedul*, Bandung: Alumni, 1982

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 006/A/JA/07/2017
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

C. Sumber Lain:

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fc6089871d8a/kewenangan –
pengawasan – barang - cetakan diminta- diperjelas/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fc6089871d8a/kewenangan-pengawasan-barang-cetakan-diminta-diperjelas/)

<http://pshk.law.uui.ac.id/>, “Mahfud Masih ada Jual Beli Pasa!”, diakses tanggal 20 Agustus 2013. Moh. Mahfud MD bahkan menilai bahwa banyaknya undang-undang yang bermasalah disebabkan adanya permainan politik atau tukar menukar pasal, kebodohan dan perbuatan tidak profesional dalam penyusunan undang-undang.

[https://pshk.or.id/highlight-id/razia-dan-penyitaan-buku-besar-besaran-
melanggar-hukum/](https://pshk.or.id/highlight-id/razia-dan-penyitaan-buku-besar-besaran-melanggar-hukum/) [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fc6089871d8a/kewenangan –
pengawasan – barang - cetakan
diminta- diperjelas/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fc6089871d8a/kewenangan-pengawasan-barang-cetakan-diminta-diperjelas/)

Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 006/A/JA/07/2017
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-undang DPR RI, Analisis dan
Evaluasi Undang-undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
RI, Jakarta, 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6-13-20/PUU-VIII/2010 tanggal 13
Oktober 2010.

Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika
Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahun
Mahkamah Konstitusi RI 2012*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013.